

Pola Distraksi Media dan Pembentukan Opini Publik dalam Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer

Rahmat Kausar

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Rahmatkausarha@gmail.com

Maitsa Laila Martin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola distraksi media dalam pembentukan opini publik pada komunikasi politik Indonesia kontemporer. Masalah utama penelitian berangkat dari kecenderungan ruang publik digital yang bergerak cepat, algoritmik, dan mudah dipenuhi isu tandingan ketika muncul kritik terhadap kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kritis berbasis studi pustaka dan analisis kasus komparatif, penelitian ini mengkaji tiga episode salience isu: kontestasi tagar protes dan narasi optimisme negara, kontroversi etika elite politik yang beririsan dengan isu hukum, serta pemberitaan korupsi sektor energi yang berdekatan dengan isu ekonomi makro. Kerangka analisis memadukan model propaganda Herman dan Chomsky, teori agenda setting, teori framing, computational propaganda, serta ekonomi perhatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distraksi media bekerja melalui empat pola: penggeseran agenda, pengemasan ulang isu, spektakularisasi emosional, dan amplifikasi terkoordinasi oleh aktor digital. Distraksi tidak selalu menghapus isu utama, tetapi menurunkan daya tahan perhatian publik, mengaburkan prioritas demokratis, dan membentuk konsensus semu di ruang digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media kritis, transparansi komunikasi pemerintah, dan audit terhadap jaringan manipulasi opini publik.

Kata Kunci: agenda setting; distraksi media; framing; komunikasi politik; opini publik

Abstract

This study examines patterns of media distraction in shaping public opinion within contemporary Indonesian political communication. The research problem emerges from a digital public sphere that is fast-moving, algorithmic, and vulnerable to counter-issues whenever criticism toward power becomes salient. Using a critical qualitative approach based on literature review and comparative case analysis, this study investigates three issue-salience episodes: the contestation between protest hashtags and state optimism narratives, an elite-ethics controversy intersecting with legal issues, and corruption coverage in the energy sector that coincided with macroeconomic concerns. The analytical framework integrates Herman and Chomsky's propaganda model, agenda-setting theory, framing theory, computational propaganda, and attention economy. The findings reveal four recurring mechanisms of media distraction: agenda displacement, issue reframing, emotional spectacularization, and coordinated amplification by digital actors. Media distraction does not necessarily erase the core issue; rather, it weakens the durability of public attention, blurs democratic priorities, and produces pseudo-consensus in the digital sphere. The study highlights the need for critical media literacy, transparent government communication, and systematic audits of opinion-manipulation networks.

Keywords: agenda setting; framing; media distraction; political communication; public opinion

PENDAHULUAN

Komunikasi politik Indonesia pada dekade terakhir tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pertarungan pidato elite, konferensi pers, atau pemberitaan media arus utama. Arena politik kini berlangsung dalam ekosistem komunikasi yang menggabungkan media daring, platform media sosial, algoritma rekomendasi, influencer, akun anonim, serta jaringan komentar yang bergerak cepat. Dalam lingkungan seperti ini, opini publik bukan semata-mata lahir dari pertimbangan rasional warga, melainkan

juga dari pertarungan memperebutkan atensi. Isu yang paling penting secara demokratis belum tentu menjadi isu yang paling tampak; sebaliknya, isu yang paling emosional, sensasional, dan mudah diviralkan dapat menggeser perhatian publik dari persoalan yang memiliki dampak struktural.

Fenomena tersebut relevan dengan gagasan Noam Chomsky tentang propaganda modern. Dalam *Media Control*, Chomsky (2002) menekankan bahwa masyarakat demokratis dapat dikendalikan bukan melalui sensor

langsung semata, tetapi melalui pengelolaan persetujuan dan pembatasan horizon berpikir publik. Dalam *Manufacturing Consent*, Herman dan Chomsky (2002) menjelaskan bahwa media dapat beroperasi melalui filter struktural yang membuat kepentingan elite tampak sebagai kepentingan umum. Jika model klasik tersebut lahir dalam konteks media massa korporat, maka konteks Indonesia kontemporer memperlihatkan perluasan arena: propaganda tidak hanya bekerja melalui redaksi media, tetapi juga melalui jejaring digital, buzzer, akun anonim, trending topic, dan produksi narasi tandingan.

Dalam konteks ini, istilah distraksi media merujuk pada proses ketika perhatian publik digeser dari isu utama menuju isu lain yang lebih mudah dikonsumsi, lebih emosional, atau lebih menguntungkan bagi aktor tertentu. Distraksi tidak selalu berarti kebohongan total. Ia dapat bekerja melalui penonjolan sebagian fakta, pengulangan isu tandingan, dramatisasi tokoh, atau pengalihan percakapan dari substansi kebijakan menuju konflik personal. Dengan demikian, distraksi media perlu dibaca sebagai pola komunikasi politik, bukan sekadar peristiwa kebetulan dalam arus berita harian.

Penelitian tentang agenda setting menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik (McCombs & Shaw, 1972). Teori framing menambahkan bahwa media bukan hanya memilih isu, melainkan juga membentuk cara publik memahami isu tersebut melalui pemilihan sudut pandang, penekanan masalah, atribusi sebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian (Entman, 1993). Dalam era media sosial, proses ini diperkuat oleh *computational propaganda*, yaitu

penggunaan algoritma, otomasi, dan kurasi manusia untuk memanipulasi opini publik (Da San Martino et al., 2020; Pote, 2024).

Indonesia merupakan kasus penting karena tingkat penetrasi internet yang tinggi beririsan dengan polarisasi politik, rendahnya kepercayaan terhadap institusi tertentu, dan penggunaan influencer atau buzzer dalam kontestasi kebijakan. Reuters melaporkan bahwa pada 2026 Amnesty International menuduh adanya intensifikasi kampanye disinformasi daring terhadap aktivis dan jurnalis kritis di Indonesia setelah pergantian pemerintahan 2024. Laporan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seluruh operasi komunikasi negara, tetapi cukup menunjukkan bahwa manipulasi opini digital telah menjadi isu serius dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pola distraksi media dalam pembentukan opini publik pada komunikasi politik Indonesia kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana pola distraksi media muncul dalam isu politik digital; bagaimana agenda setting dan framing bekerja dalam menggeser atensi publik; serta bagaimana kerangka propaganda model dapat menjelaskan hubungan antara media, aktor politik, dan pembentukan konsensus semu di ruang publik digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Propaganda, Persetujuan, dan Kontrol Atensi

Propaganda dalam masyarakat modern tidak selalu hadir sebagai instruksi kasar dari penguasa kepada media. Propaganda dapat tampil sebagai normalisasi cara berpikir, seleksi isu, dan pengulangan istilah tertentu sampai

publik menganggapnya wajar. Chomsky (2002) menyebut demokrasi modern memerlukan manufaktur persetujuan karena kekuasaan tidak dapat terus-menerus bergantung pada paksaan fisik. Dalam perspektif ini, pengendalian opini dilakukan dengan mengatur apa yang dianggap masuk akal, siapa yang dipercaya sebagai sumber, dan isu apa yang layak diperdebatkan.

Herman dan Chomsky (2002) mengembangkan propaganda model melalui lima filter: kepemilikan media, iklan, sumber berita, flak, dan ideologi dominan. Pada ekosistem digital, filter tersebut tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Kepemilikan media berinteraksi dengan platform digital; iklan bertransformasi menjadi ekonomi klik; sumber berita bersaing dengan narasi resmi dan influencer; flak muncul dalam bentuk serangan komentar, doxing, atau delegitimasi; sedangkan ideologi dominan dapat diproduksi melalui tagar, meme, dan framing nasionalisme.

Agenda Setting dan Framing

Agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan memengaruhi prioritas isu dalam benak publik. Dalam situasi krisis politik, media tidak harus mengatakan kepada publik apa yang harus dipikirkan, tetapi dapat membuat publik merasa bahwa isu tertentu lebih penting daripada isu lain. Ketika isu kebijakan, ekonomi, atau hukum mulai mendapatkan tekanan publik, munculnya isu tandingan yang lebih personal dan emosional dapat melemahkan daya tahan perhatian terhadap isu utama.

Framing bekerja pada level makna. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing mencakup penentuan masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian. Dalam konteks distraksi media, framing dapat

menggeser kritik substantif menjadi konflik emosional; kritik kebijakan dapat dibingkai sebagai kebencian politik; dan tuntutan akuntabilitas dapat dibingkai sebagai kegaduhan yang mengganggu stabilitas. Dengan demikian, distraksi media tidak hanya terjadi karena isu lain muncul, tetapi karena isu utama dibingkai ulang secara sistematis.

Buzzer, Computational Propaganda, dan Konsensus Semu

Studi propaganda komputasional menunjukkan bahwa manipulasi opini digital tidak selalu dilakukan oleh bot otomatis sepenuhnya. Ia dapat melibatkan kombinasi akun manusia, akun anonim, akun semi-otomatis, influencer, komunitas partisan, dan algoritma platform. Da San Martino et al. (2020) menekankan bahwa propaganda digital mengeksploitasi anonimitas internet, micro-targeting, serta kemudahan membangun jaringan akun terkoordinasi. Pote (2024) menambahkan bahwa bentuk propaganda kontemporer semakin bergeser menuju pengelolaan percakapan melalui algoritma dan kurasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, istilah buzzer politik merujuk pada aktor digital yang mempromosikan pesan, menyerang kritik, atau menciptakan kesan dukungan luas. Rasidi (2023) melihat operasi semacam itu sebagai bagian dari cybermilitias yang bermain dalam bayang-bayang negara predator, sementara studi tentang buzzer menunjukkan bahwa kerja digital tidak selalu tampak sebagai kerja politik formal, melainkan sering disamarkan sebagai partisipasi warga biasa. Di sinilah muncul konsensus semu: publik seolah-olah melihat dukungan mayoritas, padahal yang tampak dapat merupakan hasil amplifikasi terkoordinasi.

Teori	Asumsi Utama	Relevansi dalam Penelitian
Propaganda model	Media dan komunikasi bekerja melalui filter ekonomi-politik.	Menjelaskan hubungan elite, media, dan produksi persetujuan.
Agenda setting	Penonjolan isu menentukan prioritas perhatian publik.	Menganalisis penggeseran isu utama oleh isu tandingan.
Framing	Realitas dipilih dan dikemas melalui sudut pandang tertentu.	Membaca cara kritik kebijakan dibingkai ulang menjadi konflik personal.
Computational propaganda	Algoritma, akun, dan kurasi manusia memanipulasi opini.	Menjelaskan buzzer, akun anonim, dan koordinasi digital.
Attention economy	Perhatian publik adalah sumber daya politik dan ekonomi.	Menjelaskan mengapa isu sensasional lebih mudah mengalahkan isu substantif.

Tabel 1. Matriks Kerangka Teoretis Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi pustaka dan analisis kasus komparatif. Pilihan metode ini didasarkan pada karakter objek penelitian yang berupa pola komunikasi, struktur wacana, dan dinamika atensi publik, bukan perilaku individu yang diukur melalui survei primer. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim adanya niat tersembunyi aktor tertentu, melainkan memetakan pola saliens, framing, dan pergeseran agenda berdasarkan sumber terbuka.

Data penelitian diperoleh dari tiga kategori sumber: literatur akademik tentang propaganda, agenda setting, framing, dan komunikasi politik digital; laporan organisasi internasional dan media kredibel tentang disinformasi, platform digital, dan isu politik Indonesia; serta jejak wacana publik berupa tagar, narasi media, dan pemberitaan daring yang berkaitan dengan kasus-kasus berdaya saliens tinggi. Sumber dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan isu distraksi media, kemutakhiran, kredibilitas penerbit, dan

keterhubungan dengan konteks Indonesia.

Unit analisis penelitian adalah episode komunikasi politik, bukan individu. Episode dipilih berdasarkan tiga kriteria: adanya isu utama yang memiliki dampak publik luas; adanya isu tandingan atau narasi pengalihan yang muncul dalam periode berdekatan; dan tersedianya sumber sekunder yang memungkinkan pembacaan agenda dan framing. Tiga episode yang digunakan adalah: kontestasi tagar protes dan narasi optimisme negara, kontroversi etika elite politik yang beririsan dengan isu hukum, serta kasus korupsi sektor energi yang berdekatan dengan isu ekonomi makro.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi isu utama dan isu tandingan. Kedua, pembacaan agenda setting melalui saliens, intensitas, dan durasi percakapan. Ketiga, analisis framing terhadap definisi masalah, atribusi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Keempat, sintesis kritis menggunakan propaganda model untuk membaca hubungan antara sumber berita, flak digital, dan pembentukan konsensus semu. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, perbandingan lintas kasus, dan audit logika teoretis.

Episode	Isu Utama	Isu Tandingan/Narasi Beririsan	Alasan Pemilihan
---------	-----------	--------------------------------	------------------

A	Protes publik dan kritik terhadap arah kebijakan negara	Narasi optimisme, stabilitas, dan delegitimasi kritik sebagai pesimisme	Memperlihatkan kontestasi tagar dan perebutan makna atas krisis politik.
B	Kontroversi etika elite politik dan pertanyaan akuntabilitas	Personalisasi isu, hiburan politik, dan konflik gaya hidup elite	Menunjukkan pergeseran dari akuntabilitas kelembagaan ke perhatian personal.
C	Korupsi sektor energi dan tekanan ekonomi makro	Polemik mutu BBM, gejolak pasar, dan isu sensasional lain	Membaca bagaimana isu struktural ekonomi bersaing dengan isu konsumtif dan emosional.

Tabel 2. Unit Analisis Episode Komunikasi Politik

Dimensi Analisis	Indikator	Pertanyaan Operasional
Saliensi isu	Frekuensi kemunculan, durasi pembicaraan, posisi isu dalam media	Apakah isu utama bertahan atau cepat tergeser?
Temporalitas	Kedekatan waktu antara isu utama dan isu tandingan	Apakah isu tandingan muncul ketika isu utama sedang menekan aktor politik?
Framing	Definisi masalah, sebab, moral judgement, solusi	Bagaimana isu dibingkai agar publik melihatnya secara tertentu?
Amplifikasi digital	Akun anonim, komentar seragam, tagar, influencer	Apakah terdapat indikasi pengulangan narasi oleh aktor digital?
Efek opini publik	Polarisasi, delegitimasi kritik, konsensus semu	Bagaimana persepsi publik diarahkan atau dipersempit?

Tabel 3. Indikator Operasional Analisis Distraksi Media

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pertama: Penggeseran Agenda

Temuan pertama menunjukkan bahwa distraksi media bekerja melalui penggeseran agenda. Dalam episode yang dianalisis, isu utama biasanya memiliki karakter struktural: menyangkut kebijakan negara, akuntabilitas elite, korupsi, atau kondisi ekonomi. Namun isu tandingan cenderung memiliki karakter emosional, personal, dan mudah dikonsumsi. Dengan demikian, publik tidak selalu dipaksa melupakan isu utama; publik cukup dibuat kelelahan, terpecah, atau tertarik pada isu lain yang lebih ringan.

Dalam perspektif agenda setting, penggeseran ini terjadi ketika isu tandingan memperoleh saliensi yang lebih tinggi daripada isu utama. Platform digital mempercepat proses tersebut karena algoritma lebih menyukai konten

yang memicu reaksi cepat. Isu ekonomi atau hukum membutuhkan penjelasan kompleks, sedangkan skandal personal, konflik elite, atau narasi emosional lebih mudah dipotong menjadi konten pendek. Akibatnya, isu yang lebih penting secara substantif dapat kalah oleh isu yang lebih kuat secara afektif.

Model propaganda Herman dan Chomsky membantu menjelaskan bahwa agenda tidak semata ditentukan oleh peristiwa objektif, tetapi oleh sumber, kepentingan, dan tekanan yang membentuk pemberitaan. Dalam konteks digital, flak tidak hanya muncul melalui surat pembaca atau tekanan institusional, tetapi juga melalui komentar massal, serangan personal, dan pembungkaman ulang terhadap pengkritik. Mereka yang mempertanyakan kebijakan dapat diposisikan sebagai pembuat gaduh, anti-negara, atau tidak memahami situasi.

Pola Kedua: Reframing Kritik menjadi Konflik Emosional

Pola kedua adalah reframing, yaitu pengemasan ulang kritik substantif menjadi konflik emosional. Kritik terhadap akuntabilitas dapat dialihkan menjadi perdebatan tentang kepribadian pengkritik. Kritik terhadap kebijakan dapat dibingkai sebagai pesimisme, kebencian, atau kepentingan politik oposisi. Dengan framing semacam ini, publik tidak lagi membicarakan substansi masalah, melainkan memperdebatkan motif orang yang mengkritik.

Framing emosional efektif karena bekerja pada aspek afektif khalayak. Konten yang membangkitkan marah, bangga, takut, atau malu cenderung lebih mudah tersebar daripada uraian data. Dalam situasi ini, buzzer atau akun anonim berperan sebagai penguat frame. Mereka tidak harus menghasilkan argumen baru; cukup mengulang label, meme, dan komentar yang sama untuk menciptakan kesan bahwa frame tersebut merupakan pendapat mayoritas.

Reframing juga memperlihatkan perubahan fungsi media sosial dari ruang deliberasi menjadi arena delegitimasi. Ketika kritik dipahami sebagai serangan, proses demokratis menjadi miskin argumentasi. Publik lebih banyak menilai siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan. Inilah bentuk konsensus semu: dukungan tampak luas, tetapi terbentuk melalui pengulangan dan tekanan simbolik, bukan melalui perdebatan rasional.

Pola Ketiga: Spektakularisasi Isu Tandingan

Pola ketiga adalah spektakularisasi isu tandingan. Spektakularisasi terjadi ketika isu dibuat lebih dramatis, visual, dan mudah dipersonalisasi daripada isu utama. Dalam logika ekonomi perhatian, isu yang paling kuat bukan selalu isu yang paling penting, melainkan isu yang paling mampu memproduksi reaksi cepat. Skandal personal, gaya hidup elite, konflik selebritas, atau potongan video emosional dapat menyerap perhatian lebih kuat daripada laporan audit, putusan hukum, atau data ekonomi.

Spektakularisasi tidak harus dirancang oleh satu pusat komando. Ia dapat muncul melalui pertemuan antara logika media, kepentingan politik, dan algoritma platform. Media membutuhkan klik; aktor politik membutuhkan pengalihan tekanan; platform membutuhkan keterlibatan pengguna. Ketiga logika ini dapat bertemu dalam satu arus isu yang tampak natural, padahal memiliki konsekuensi politik: melemahkan perhatian terhadap isu struktural.

Dalam konteks Indonesia, spektakularisasi diperkuat oleh budaya politik yang sangat personalistik. Debat kebijakan sering kali cepat berubah menjadi debat tokoh. Akibatnya, isu tentang institusi, desain kebijakan, atau tanggung jawab publik terseret ke ranah moral personal. Dengan cara ini, politik tidak hilang dari media, tetapi berubah menjadi hiburan politik yang miskin akuntabilitas.

Pola	Mekanisme Komunikasi	Dampak terhadap Opini Publik
Penggeseran agenda	Isu tandingan dinaikkan ketika isu utama sedang menekan aktor politik.	Perhatian publik terpecah dan isu utama kehilangan daya tahan.
Reframing kritik	Kritik substantif dibingkai sebagai kebencian, pesimisme, atau serangan politik.	Publik menilai motif pengkritik, bukan substansi masalah.

Spektakularisasi	Isu personal dan emosional dibuat lebih menarik daripada isu struktural.	Isu penting kalah oleh isu viral yang mudah dikonsumsi.
Amplifikasi terkoordinasi	Akun anonim, influencer, dan komentar seragam mengulang narasi tertentu.	Terbentuk kesan dukungan mayoritas atau konsensus semu.

Tabel 4. Sintesis Pola Distraksi Media

Amplifikasi Terkoordinasi dan Buzzer Politik

Pola keempat berkaitan dengan amplifikasi terkoordinasi. Dalam ruang digital, sebuah narasi dapat tampak organik meskipun didorong oleh jaringan aktor yang bekerja serentak. Ciri-cirinya antara lain komentar berulang dengan struktur bahasa serupa, akun minim identitas, pola serangan personal, penggunaan label delegitimatif, serta pembingkaiannya sebagai ancaman. Literatur propaganda komputasional menyebut gejala ini sebagai bagian dari manipulasi opini berbasis jaringan.

Buzzer politik tidak selalu dapat dibuktikan sebagai akun berbayar hanya dari tampilan permukaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan istilah indikasi amplifikasi terkoordinasi, bukan vonis individual. Secara metodologis, pembuktian pembayaran atau koordinasi internal memerlukan data forensik, akses platform, atau dokumen organisasi. Namun secara wacana, pola pengulangan narasi, keseragaman bahasa, dan serangan terhadap kritik dapat dianalisis sebagai gejala komunikasi politik yang memengaruhi opini publik.

Dampak paling serius dari amplifikasi terkoordinasi adalah rusaknya representasi opini publik. Dalam demokrasi, opini publik seharusnya mencerminkan pertimbangan warga yang relatif bebas. Namun ketika ruang komentar dipenuhi narasi seragam, publik dapat salah membaca realitas sosial: pendapat minoritas yang terkoordinasi tampak seperti mayoritas, sedangkan kritik warga asli terlihat

seolah terisolasi. Kondisi ini mempersempit ruang deliberasi dan menurunkan kualitas demokrasi.

Implikasi terhadap Komunikasi Politik Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distraksi media tidak dapat direduksi menjadi sekadar "pengalihan isu" dalam bahasa sehari-hari. Secara akademik, ia merupakan rangkaian mekanisme agenda, framing, emosi, dan amplifikasi digital. Distraksi bekerja paling efektif ketika isu utama membutuhkan pemahaman kompleks, sementara isu tandingan menawarkan kepuasan afektif yang cepat. Dalam konteks inilah media digital dapat menjadi arena yang mempercepat pendangkalan opini publik.

Implikasi pertama adalah kebutuhan transparansi komunikasi pemerintah. Pemerintah demokratis seharusnya tidak hanya menyampaikan narasi optimisme, tetapi juga menjawab kritik dengan data, dokumen, dan mekanisme akuntabilitas. Ketika kritik dijawab dengan propaganda atau delegitimasi, kepercayaan publik justru mengalami erosi. Kedua, media perlu memperkuat etika agenda editorial agar tidak mudah terseret pada isu sensasional yang menutup isu publik yang lebih substantif.

Implikasi ketiga adalah perlunya literasi media kritis. Publik perlu dilatih membedakan isu utama dan isu tandingan, mengenali framing, serta membaca pola komentar terkoordinasi. Literasi media tidak cukup mengajarkan cara memeriksa hoaks, tetapi juga harus mengajarkan cara membaca struktur kuasa di balik penonjolan isu. Keempat, platform digital perlu didorong untuk

lebih transparan dalam menangani jaringan manipulasi opini, terutama jika

menyangkut isu politik dan kebijakan publik.

Aktor	Risiko dalam Distraksi Media	Rekomendasi
Pemerintah	Komunikasi berubah menjadi propaganda dan delegitimasi kritik.	Membangun komunikasi krisis berbasis data, transparansi, dan hak jawab terbuka.
Media massa	Terjebak ekonomi klik dan memperbesar isu sensasional.	Menjaga agenda editorial pada isu berdampak publik tinggi.
Platform digital	Algoritma memperkuat konten emosional dan jaringan manipulatif.	Membuka transparansi moderasi dan mendeteksi koordinasi tidak autentik.
Masyarakat sipil	Kritik terpecah oleh serangan personal dan polarisasi.	Mengembangkan literasi framing, fact-checking, dan solidaritas digital.

Tabel 5. Implikasi Tata Kelola Komunikasi Publik

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola distraksi media dalam komunikasi politik Indonesia kontemporer bekerja melalui empat mekanisme utama: penggeseran agenda, reframing kritik, spektakularisasi isu tandingan, dan amplifikasi terkoordinasi. Keempat mekanisme tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam ekosistem media digital yang digerakkan oleh logika kecepatan, emosi, dan keterlibatan pengguna.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas relevansi propaganda model Herman dan Chomsky ke konteks digital Indonesia. Jika propaganda klasik bekerja melalui filter media massa, maka propaganda digital bekerja melalui interaksi antara media daring, platform algoritmik, influencer, buzzer, akun anonim, dan ekonomi perhatian. Dengan demikian, kontrol opini publik tidak selalu terjadi melalui sensor langsung, tetapi melalui pengelolaan atensi, pengemasan isu, dan produksi konsensus semu.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa distraksi media tidak selalu menghapus isu utama. Ia lebih sering menurunkan daya tahan perhatian publik, mengaburkan prioritas demokratis, dan membuat isu struktural kalah oleh isu

sensasional. Dalam jangka panjang, pola semacam ini dapat memperlemah kualitas deliberasi publik dan mengurangi kemampuan warga untuk menuntut akuntabilitas kekuasaan.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat diperkuat melalui analisis big data dengan akses API media sosial, pengukuran jaringan akun, serta analisis sentimen lintas platform. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode campuran dengan survei publik untuk menguji sejauh mana paparan isu tandingan memengaruhi persepsi terhadap isu utama. Bagi media dan masyarakat sipil, hasil penelitian ini menekankan pentingnya menjaga daya tahan perhatian publik terhadap isu-isu struktural, terutama isu yang berkaitan dengan akuntabilitas, korupsi, kebijakan ekonomi, dan hak warga.

Bagi pembuat kebijakan, komunikasi publik yang sehat harus dibangun melalui transparansi, bukan produksi narasi tandingan yang mengalihkan substansi kritik. Demokrasi yang kuat membutuhkan ruang publik yang memungkinkan kritik dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan pengaburan agenda atau serangan terhadap pengkritik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2026). Building up imaginary enemies: How Indonesian authorities use online disinformation to target critics. Amnesty International.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122-139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Oxford Internet Institute.
- Chomsky, N. (2002). *Media control: The spectacular achievements of propaganda* (2nd ed.). Seven Stories Press.
- Da San Martino, G., Cresci, S., Barron-Cedeno, A., Yu, S., Di Pietro, R., & Nakov, P. (2020). A survey on computational propaganda detection. *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 4826-4832. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/672>
- Dimitrov, D., Ali, B. B., Shaar, S., Alam, F., Silvestri, F., Firooz, H., & Nakov, P. (2021). Detecting propaganda techniques in memes. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 6603-6617.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fakhruzzaman, M. N., Jannah, S. Z., Ningrum, R. A., & Fimiyah, I. (2021). Clickbait headline detection in Indonesian news sites using multilingual bidirectional encoder representations from transformers. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2102.01497>
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (Rev. ed.). Pantheon Books.
- Lim, M. (2023). Everything everywhere all at once: Social media, algorithmic/marketing culture, and activism in Southeast Asia. *Georgetown Journal of International Affairs*, 24(2), 181-190. <https://doi.org/10.1353/gia.2023.a913644>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Mugurtay, N., Duygu, U., & Varol, O. (2024). Politics and propaganda on social media: How Twitter and Meta moderate state-linked information operations. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2401.02095>
- Pote, M. (2024). Computational propaganda theory and bot detection system: Critical literature review. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2404.05240>
- Rasidi, P. P. (2023). Ludic cybermilitias: Shadow play and computational propaganda in the Indonesian predatory state. *Communication, Culture & Critique*.
- Reuters. (2024, August 28). Indonesia's anti-graft body plans to query president's son about private jet trip. Reuters.
- Reuters. (2025, March 3). Indonesia's Pertamina pledges to improve transparency following corruption allegations. Reuters.
- Reuters. (2025, August 27). Indonesia urges TikTok, Meta to act against harmful online content. Reuters.
- Reuters. (2026, May 19). Indonesian authorities using online disinformation campaigns to target critics, Amnesty says. Reuters.
- Rudyansjah, T., & Rasidi, P. P. (2022). Virtual embodiment in physical realities: Brand buzzers and disciplined bodies in an Indonesian cyberscape. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*.

- Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.
- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.